

Penerapan Tata Kelola Keuangan Pada Koperasi Serba Usaha Werdhi Sedana Desa Baha Kecamatan Mengwi

Ni Kadek Yeni Dwi Putri⁽¹⁾

I Wayan Sudiana⁽²⁾

Kadek Dewi Padnyawati⁽³⁾

⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata Universitas Hindu Indonesia
Jl. Sanggalangit, Penatih Denpasar Timur
Email : puturesaputricahyani08@gmail.com

ABSTRACT

Family values are the cornerstone of the cooperative movement, which is a people's economic movement. The framework and procedures used to decide on a company's course and level of oversight are known as governance. The purpose of this thesis is to clarify or characterize the financial governance practices used by the Mengwi District's Baha Village Cooperative. This study employs qualitative research methodology, gathering data via observation, interviews, and documentation. The Werdhi Sedana Cooperative's management is the research's informant. The study's findings support the following conclusion: Werdhi Sedana Cooperative has done a good job of maximizing governance through the application of transparency, accountability, responsibility, independence, and justice by offering excellent service, growing cooperatives, assigning employees according to their roles, sharing information, and offering members training. There are challenges facing the Werdhi Sedana Cooperative from both inside and outside the organization that hinder the wellbeing of its members. By providing administrators and members with training, as well as by reaching out to members to better understand cooperatives, the Werdhi Sedana Cooperative should aim to optimize governance.

Keywords: Cooperatives, Governance, Good Corporate Governance

PENDAHULUAN

Kelompok orang yang secara sukarela berkumpul dalam suatu organisasi demokratis untuk memperjuangkan peningkatan kemakmuran ekonomi mereka dikenal sebagai koperasi. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 menyatakan bahwa "koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeuargaan.". Koperasi memiliki kemampuan untuk mendapatkan kredit saat bertindak sebagai penyalur dana masyarakat.

Di sini, koperasi diharapkan dapat berusaha untuk menjaga keberlangsungan usaha mereka. Kementrian Koperasi dan UMKM mengatakan bahwa karena koperasi didasarkan pada kekeluargaan, mereka berbeda dengan perbankan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian Indonesia, pasal 33 menyatakan bahwa "hubungan antara pengelola usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dengan pengurus koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan", dan pasal 34, menyatakan bahwa pengurus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan sengaja dapat

Implementasi tata kelola keuangan terbagi menjadi dua kategori. Kategori pertama mengacu pada kerangka normatif, yang terdiri dari peraturan dari pasar keuangan, sistem hukum, dan peradilan, antara lain. Kategori kedua mengacu pada kecenderungan perilaku perusahaan, yang dapat diukur dengan kinerja, struktur pembiayaan, perlakuan, dan bahkan pertumbuhan, yang dapat diamati oleh pemegang saham dan stakeholder.

Bali adalah salah satu tempat yang kurang dalam menerapkan Good Corporate Governance. Koperasi di sana menghadapi masalah karena tata kelola yang buruk, termasuk independensi yang lemah, manajemen dan kepemimpinan yang buruk, sumber daya yang tidak memadai, dan pelanggaran hukum.

Dengan demikian, penelitian dengan judul "Penerapan Tata Kelola Keuangan Pada Koperasi Serba Usaha Werdhi Sedana desa Baha kecamatan Mengwi" bertujuan untuk memberikan penjelasan dan penjelasan tentang penerapan tata kelola keuangan pada koperasi, khususnya di Koperasi Serba Usaha Werdhi Sedana desa Baha kecamatan Mengwi.

KAJIAN PUSTAKA

Studi ini didasarkan pada teori manajemen. Menurut teori ini, manajer harus berperilaku sesuai dengan kepentingan orang lain daripada kepentingannya sendiri. Jika kepentingan manajer dan pemilik berbeda, mereka akan berusaha bekerja sama daripada menentangnya.

Ada kemungkinan bahwa penerapan tata kelola keuangan koperasi akan menunjukkan bahwa bisnis berada dalam kondisi yang baik. Tindakan yang mementingkan diri sendiri dan mengabaikan kepentingan investor adalah ciri utama dari penerapan ini. Tata kelola memengaruhi nilai perusahaan. Tata kelola meningkatkan nilai perusahaan saat mengawasi perusahaan. Pengawasan langsung terhadap operasi bisnis memungkinkan evaluasi mekanisme manajemen yang efektif. (Seperti yang dinyatakan dalam buku Riska Franita:2018 mekanisme kepemimpinan perusahaan yang baik)

Laporan keuangan adalah laporan keuangan entitas yang biasanya terdiri dari neraca, income statement, laporan perputaran kas, dan catatan tambahan. Tujuan laporan keuangan ini adalah untuk menilai kondisi keuangan, tingkat keuntungan atau profitabilitas, dan perputaran kas secara keseluruhan, sehingga pemakai dapat memahami keadaan dan kondisi perusahaan dengan melihat laporan keuangan lainnya. Arus kas masuk adalah aliran uang dari sumber yang menghasilkan uang, dan arus kas keluar adalah aliran uang dari sumber yang menghasilkan uang.

Arus kas masuk biasa adalah uang yang datang dari sumber tertentu, seperti uang yang diterima dari penjualan tunai atau piutang yang dibayarkan untuk penjualan kredit. Laporan arus kas keluar menunjukkan jumlah kas yang diperlukan untuk pembayaran jika ada utang atau kredit yang tidak rutin. Arus kas keluar bersifat rutin termasuk pembayaran upah, bahan pembantu, dan gaji, sedangkan arus kas keluar tidak rutin termasuk pembayaran angsuran utang dan pembayaran dividen. Menurut Komite Nasional Kebijakan Kelolaan (KNKG) (2006), ada beberapa prinsip dan aturan utama yang membentuk tata kelola keuangan koperasi yang efektif, antara lain:

1. **Transparansi:** Sesuai dengan hak pemangku kepentingan, perusahaan harus menyediakan informasi yang tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dapat dibandingkan, dan mudah diakses.
2. **Akuntabilitas:** Perusahaan harus memastikan bahwa setiap bagian dan karyawan memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan peran mereka dalam pelaksanaan GCG. Ini harus dilakukan dengan jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai, dan startegi perusahaan.

3. Responsif: Perusahaan harus mematuhi prinsip kehati-hatian dan peraturan perusahaan, seperti anggaran dasar.
4. Independensi : Masing-masing organ perusahaan harus memastikan bahwa tidak ada pihak kepentingan tertentu yang mendominasi mereka. Tidak terpengaruh oleh konflik kepentingan, juga dikenal sebagai konflik kepentingan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif.
5. Kewajaran dan Kesetaraan: Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk berbicara dan memberikan pendapat mereka untuk kepentingan perusahaan. Ini sesuai dengan prinsip transparansi dalam posisi masing-masing.

Dengan menerapkan tata kelola keuangan, tujuan adalah untuk meningkatkan nilai koperasi dengan meningkatkan transparansi, independensi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, dan kewajaran dalam proses operasi bisnis. Peneliti memberikan daftar studi sebelumnya sebagai referensi, seperti:

Menurut "Akuntabilitas koperasi simpan pinjam di Jawa Tengah", studi tahun 2020 oleh Benedicta Adinsa Bella Savira dan Indira, koperasi tersebut berusaha untuk menunjukkan tanggung jawab yang telah diberikan kepada anggota dan kreditur dengan menggunakan jasa pihak independen dan menjalankan organisasi manajemen dengan baik.

Dalam penelitian Amelia Ardhiya Garini yang berjudul "Efektivitas penerapan prinsip good corporate governance pada BSI KCP Jakarta", ia menemukan bahwa pedoman (GCG), perundang-undangan yang berlaku, dan prinsip syariah telah diterapkan dengan baik dan sesuai dengan pedoman (GCG). Ini menunjukkan bahwa keberlangsungan dan reputasi bank syariah sangat bergantung pada penerapan prinsip-prinsip ini.

Dalam penelitian mereka yang berjudul "Analisis Tata Kelola Keuangan Desa Bandar Tengah" (2023), Zulia Almaida Siregar, Bahrudi Effendi, dan Ika Purnama Sari menemukan bahwa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban adalah beberapa tahap yang membentuk akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Bandar Tengah. Mereka menemukan bahwa meskipun tahap perencanaan dilakukan dengan baik, pelaksanaan tahap pelaksanaan

Hasil penelitian Noviasky Aulia tahun 2019 berjudul "Analisis Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG)" menunjukkan bahwa prinsip-prinsip GCG telah diterapkan dengan baik di kantor cabang Barwijaya Bank X, di mana setiap prinsip diterapkan sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku.

Tony, Martinus Sony, dan Lilis Binawati (2018) melakukan penelitian dengan judul "analisis good corporate governance pada koperasi". Hasilnya menunjukkan bahwa pengurus telah memberikan transparansi tentang pelaporan keuangan yang telah diaudit secara independen oleh akuntan publik; independensi telah dilaksanakan dengan baik; akuntabilitas telah dilaksanakan dengan baik; dan akuntan publik telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Dengan menerapkan Penerapan Tata Kelola Keuangan Koperasi, desain penelitian ini sangat membantu dalam pelaksanaan dan pengelolaan keuangan koperasi. Ini memungkinkan mereka untuk mengatur pengarahannya dan mengawasi kegiatan keuangan seperti pemanfaatan dana usaha. Dengan demikian, penerapan tata kelola keuangan harus diterapkan pada koperasi agar dapat berkembang dan berubah sesuai dengan keadaan dan kondisi saat ini. Dalam penelitian ini, empat informan—manajer, akuntan, teller, dan kolektor kredit—memahami masalah dan dapat memberikan informasi. Penelitian ini menggunakan wawancara kualitatif.

```

graph TD
    A[Penerapan Tata Kelola Keuangan Pada Koperasi Koperasi Werdhi Sedana] --> B[Arus Kas]
    B --> C[Arus Kas Masuk]
    B --> D[Arus Kas Keluar]
    C --> E[Transparansi]
    C --> F[Akuntabilitas]
    C --> G[Responsibilitas]
    C --> H[Indepedensi]
    C --> I[Kewajaran Dan Kesetaraan]
    D --> E
    D --> F
    D --> G
    D --> H
    D --> I
    E --> J[Analisis]
    F --> J
    G --> J
    H --> J
    I --> J
    J --> K[Kesimpulan]

```


2. Semua bagian lain juga telah tercatat menggunakan program, atau sistem. Kasir dan manajer kredit bertanggung jawab atas hal ini.

Mayoritas prinsip transparansi telah diterapkan dengan baik. Werdhi Sedana, manajer Koperasi Serba Usaha, telah menerapkan proses pengambilan keputusan dan memberikan informasi secara terbuka.

Akuntabilitas

Sesuai dengan prinsip akuntabilitas, Koperasi Serba Usaha Werdhi Sedana harus menunjukkan transparansi dalam operasi dan kinerjanya. Koperasi harus dikelola dengan cara yang tepat dan sesuai dengan nilai-nilainya. Selain itu, tidak jelas apakah fungsi koperasi sesuai dengan hukum. Prinsip akuntabilitas telah diterapkan dengan baik di Koperasi Serba Usaha Werdhi Sedana, menurut penelitian yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan penilaian penilaian pribadi koperasi.

Peningkatan kesejahteraan koperasi dengan menjamin bahwa semua anggota memiliki modal yang memadai untuk berdagang; sebagai hasilnya, koperasi memberikan pinjaman modal kepada anggota yang kekurangan modal, sehingga anggota tidak perlu khawatir tentang kekurangan modal. Sebaliknya, Koperasi Serba Usaha Werdhi menawarkan layanan yang menunjukkan sikap tanggung jawabnya terhadap masyarakat. Dalam wawancara dengan INF 3, dia menyatakan, "Tanggung jawab sosial, kita lebih ke pelayanan ya, tetapi tidak optimal, jadi kita juga berikan dia secara bertahap karena jika konsumen itu punya uang, dia pasti akan ingin mengambil uangnya karena kebutuhan dan ekonomi juga, jadi kita berikan dia secara bertahap."

Pengawas Koperasi Serba Usaha Werdhi bertanggung jawab atas semua kegiatan yang dilakukan oleh koperasi. Koperasi melakukan pengawasan untuk memastikan operasinya selalu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. INF4 menyatakan bahwa "pada saat melakukan penagihan angsuran, koperasi tetap bersikap tegas dan tetap mematuhi SOP yang berlaku dengan memperingati nasabah dengan SP1, SP2, SP3 dan jika tidak mendapatkan konfirmasi dari pihak terkait, koperasi juga terpaksa melakukan penarikan jaminan." Ini dilakukan untuk kepentingan pegawai dan nasabah lain yang menyimpan uang di koperasi serta untuk menjaga operasi perusahaan. Pengawas juga bertanggung jawab untuk meningkatkan pengetahuan tentang pengelolaan risiko koperasi selain melakukan pengawasan. Koperasi dapat dianggap menerapkan prinsip akuntabilitas jika memenuhi persyaratan prinsip akuntabilitas pemerintahan koperasi yang baik. Untuk diakui sebagai menerapkan prinsip akuntabilitas, seseorang harus berkomitmen untuk menjalankan akuntabilitas.

Responsibilitas

Prinsip tanggung jawab adalah dasar untuk membantu pengurus dan pengelola memberikan layanan terbaik kepada anggota mereka tanpa terhalang oleh kepentingan pribadi atau hal-hal lain yang melanggar hukum.. Agar dianggap melaksanakan dengan baik, Koperasi Koperasi Serba Usaha Werdhi harus memenuhi berbagai kriteria prinsip responsibilitas. Prinsip khatian-hatian diterapkan untuk menjalankan koperasi. Salah satunya adalah menangkal berbagai rumor yang membuat pelanggan tidak percaya pada perusahaan. Hasil wawancara dengan INF 3 menyatakan bahwa "kita hanya bisa memberikan penjelasan kepada nasabah saat ini dengan kita buat sejenis grup jadi kita buat pengumuman dari sana mungkin ada beberapa memprofokatori di sana, udh dah dia jadi kompor gitu tapi kita hanya bisa berusaha semaksimal mungkin untuk tetap bunga kemdian, memberikan penjelasan terkait nasabah yang datang langsung ke koperasi." Catatan administrasi dan keuangan harus dibuat dengan sangat hati-hati karena mengancam reputasi pengurus dan koperasi. Kinerja sistem pengendalian internal adalah ukuran responsibilitas tambahan. Untuk menerapkan metrik prinsip ini, Anda harus memiliki kemampuan untuk melakukannya.

Dalam kasus ini, manajemen resiko Koperasi Serba Usaha Werdhi gagal mengelola perusahaan karena perusahaan mengalami masalah likuiditas yang membuatnya tidak dapat membayar gaji sesuai dengan harapan. Karena itu, banyak karyawannya meninggalkan perusahaan karena gaji mereka tidak mencukupi. Namun demikian, koperasi terus berusaha mengatasi masalah ini dengan meyakinkan anggota untuk meningkatkan simpana pokok dan modal.

Independensi

Koperasi Serba Usaha Werdhi menunjukkan kualitas manajemen kooperatif yang baik dengan mematuhi prinsip independensi dan profesionalisme. RAT seharusnya dilakukan setidaknya sekali setiap waktu. Namun, selama dua periode berturut-turut, Koperasi Serba Usaha Werdhi belum melakukan RAT. Bahwa "RAT tidak dilaksanakan selama dua periode berturut-turut, salah satu penyebabnya adalah merebaknya virus Covid-19, dan baru dilaksanakan pada akhir tahun 2023", menurut hasil wawancara INF 1.

Pengurus koperasi juga lebih banyak mengelola koperasi berdasarkan prinsip kekeluargaan dan gotong royong. Selalu mengadakan pertemuan bulanan untuk membuat keputusan secara adil. Pengelola belum pernah terlibat dalam korupsi, kolusi, atau nepotisme sampai saat ini.

- Tony, martinus sony,&lilis binawati.2018.Analisis good corporate governance pada koperasi
<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2499061&val=23872&title=Analisis%20Good%20Corporate%20Governance%20Pada%20Koperasi>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1992/25tahun~1992uu.htm>.
- Zaenal Abidin&R. Mahelan Prabantarikso .2021.Konsep dan penerapan GCG pada lembaga keuangan BUMN
- Zulia Almaida Siregar, Bahrudi Effendi, Ika Purnama Sari.(2023). Analisis Tata Kelola Keuangan Desa Bandar Tengah. Vol. 2 No. 1 (2023): Januari 2023
<https://journal.y3a.org/index.php/akua/article/view/1426> (Studi Kasus Desa Kibang Mulya Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat).
<http://digilib.unila.ac.id/71411/>